

Perkembangan Hubungan Uni-Eropa – Rusia

C.P.F. LUHULIMA

Ahli Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

Abstract

The European Union's expansion eastwards made Russia its biggest and most important neighbour. Russia's political and economic stability and Europe's most important source of its oil and gas supplies is EU's main concern. But Europe's main objective of building a strategic partnership with Russia on European values of democracy, human rights, and good governance as exhibited in Europe's Neighbourhood Policy as reflected in its Country Strategy Papers does not fare well with Putin's Russia. EU's Common Strategy of the European Union on Russia changes Putin's politics towards EU. Putin's emphasis on the Russian interpretation of European values is accompanied by strengthening the presidency and adapting its foreign policy priorities without, however, sidelining Europe too drastically. Russia's strategic foray into East Asia and the Middle East gives both the US and EU a sign that it together with China intend to change the power balance in East Asia and the Middle East. Its neo-realist approach to international politics will definitely adversely affect its partnership with EU.

Keywords: political, economic, strategic partnership, power balance

Pendahuluan: Arti Strategis Rusia bagi Uni Eropa

Rusia merupakan tetangga Uni Eropa (UE) yang paling besar dan dengan perluasan UE ke Timur lebih mendekatkannya lagi ke organisasi regional Eropa itu. Karena itu

kepentingan utama Uni Eropa ialah mendorong stabilitas politik dan ekonomi Federasi Rusia; menjamin pasokan energi yang berkelanjutan dari negara itu; mendorong kerjasama di bidang hukum, lingkungan hidup dan keselamatan nuklir untuk meng-

hadapi ancaman keamanan “lunak”; serta meningkatkan kerjasama dengan Rusia di Caucasus bagian selatan dan Negara-Negara Baru (*New Independent States*—NIS—Rusia, Ukraine, dan Baltik) bagian barat bagi stabilitas wilayah Persemakmuran Negara-Negara Berdaulat (*Commonwealth of Independent States*—CIS), termasuk penyelesaian “*frozen conflicts*,” atau lebih tepat “*frozen ethnic and territorial conflicts*”.¹

Karena itulah UE bertekad untuk membangun suatu kemitraan strategis dengan Rusia. *Strategi Keamanan Eropa 2003* menempatkan Rusia sebagai pemain kunci di bidang geopolitik dan keamanan di Eropa, tetapi juga secara global. Rusia merupakan salah satu aktor utama Dewan Keamanan PBB dan mempunyai pengaruh yang besar atas Eropa dan Asia Tengah. Yang lebih penting lagi ialah Rusia merupakan pemasok yang penting dan besar dari produk-produk energi ke UE, seperti minyak dan gas bumi yang kini merupakan sumber daya strategi yang sudah jauh lebih penting dari batubara dan besibaja sebelumnya. Karena ekonomi Rusia sedang tumbuh dengan cepat, ia merupakan suatu

pasar yang besar pula bagi barang dan jasa UE dengan kemungkinan pertumbuhan yang berlanjut. Kemudian, Rusia merupakan sekutu yang penting dalam usaha UE untuk menghadapi ancaman-ancaman baru bagi keamanannya, seperti ancaman terorisme, polusi, kejahatan transnasional, migrasi ilegal dan perdagangan manusia.

Karena itu UE mengajak Rusia untuk membangun suatu “kemitraan strategis sejati”, yang didasarkan atas kepentingan dan nilai-nilai bersama, yaitu demokrasi, hak azasi manusia, *rule of law*, serta prinsip-prinsip ekonomi pasar. Pengembangan kemitraan strategis itu diharapkan dapat melanjutkan stabilitas politik, sosial dan ekonomi di negara itu, dan dengan demikian menurunkan derajat ancaman dari belahan Timur wilayahnya. UE dan Rusia sudah bekerjasama dalam modernisasi ekonomi Rusia dan integrasinya ke dalam ekonomi dunia, di keamanan, termasuk berbagai ancaman keamanan “lunak”. UE dan Rusia meningkatkan kerjasama di bidang-bidang ini dalam rangka pengembangan *European Neighbourhood Policy*. Karena itu pembangunan landasan bagi kemitraan strategis ini pengembangan suatu wilayah di sebelah Timur Uni Eropa yang berkembang atas nilai-nilai Eropa sejati: demokrasi, penegakan hukum, pentadbiran yang baik (*good governance*), hak azasi manusia dan ekonomi pasar.

¹ Lebih lanjut mengenai “*frozen conflicts*” lihat Kim Murphy, In *Caucasus, Frozen Conflicts Are Still Hot*, *Los Angeles Times*, (North Ossetia, Rusia, (September 13, 2004)

Kebijakan Kerjasama Uni Eropa-Rusia

Dasar pengembangan hubungan UE dan Rusia ialah *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* yang mulai berlaku di tahun 1997 untuk jangka waktu 10 tahun dan yang secara otomatis diperpanjang, kecuali apabila salah satu pihak mengundurkan diri dari perjanjian itu. PCA didasarkan atas perdamaian, keamanan internasional, norma demokrasi, serta kebebasan ekonomi dan politik. Ia berusaha menciptakan jiwa kemitraan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan politik, perdagangan, ekonomi dan budaya, dan bertujuan untuk menciptakan suatu wilayah perdagangan bebas UE-Rusia.

Di bulan Juni 1999 Dewan Uni Eropa merumuskan suatu *Common Strategy of the European Union on Russia* untuk memperkuat kemitraan strategis UE-Rusia. Sasaran dasar dari Strategi Bersama ini meningkatkan koordinasi kegiatan UE terhadap Rusia. Ada empat sasaran Strategi Bersama ini, yaitu:

- 1) *To consolidate democracy, the rule of law and public institutions in Russia.*
- 2) *To integrate Russia into a common European economic and social area.*
- 3) *To co-operate with a view to strengthening stability and security both in Europe and world-wide.*
- 4) *To respond to common challenges on the European continent.*

Di KTT UE-Rusia di St. Petersburg Mei 2003, UE dan Rusia lebih meningkatkan kerjasama mereka dengan membentuk empat "*common spaces*" dalam rangka PCA itu, yang ditetapkan sebagai *common economic space, common space of freedom, security and justice, common space of cooperation in external security, dan common space of research and education and culture.* KTT Moskwa Mei 2005 menyetujui suatu paket *Road Maps* sebagai peta jangka pendek dan menengah bagi pengisian keempat *spaces* itu. KTT London di bulan Oktober 2005 membahas implementasi *Road Maps* ke empat *spaces* itu.

Sasaran *Economic Space* ialah menciptakan suatu pasar terintegrasi antara UE dan Rusia. *Common Space of Freedom, Security and Justice* mencakup *visa-free travel regime*, serta kerjasama dalam memerangi terorisme dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya seperti *money laundering, drug trafficking* dan perdagangan manusia, serta pengenalan *biometric features* bagi berbagai dokumen identifikasi. Dukungan UE bagi pengelolaan perbatasan (*border management*) dan *reform of the Russian judiciary system* merupakan pokok-pokok penting kerjasama dalam *space* ini.

Common Space on External Security menegaskan tanggungjawab kedua belah pihak bagi suatu tatanan internasional yang didasarkan atas

multilateralisme, dukungan bagi peranan penting PBB, dan bagi keefektifan OSCE dan *Council of Europe*. Di dalam *space* ini kerjasama di lima bidang prioritas ditekankan, yaitu di bidang dialog dan kerjasama internasional, di bidang perang melawan terorisme, non-proliferasi senjata pembunuh masal (WMD), *crisis management*, dan *civil protection*. Di bawah prioritas pertama, perhatian khususnya diberikan kepada stabilitas di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan perbatasan UE dan Rusia (khususnya, "*frozen ethnic and territorial conflicts*") di Transnistria, Abkhazia, Ossetia Selatan, Nagorno-Karabakh).

Common Space on Research, Education, Culture membangun atas keikutsertaan Rusia dalam penelitian dan pengembangan UE, khususnya dalam *Framework Programme for Research and Development*. Sasarannya ialah memanfaatkan kekuatan masyarakat peneliti UE dan Rusia dan mendorong kegiatan penelitian bersama di bidang-bidang yang merupakan kepentingan bersama.

Pada KTT Uni Eropa - Rusia di Helsinki 24 November 2006, yang dimaksudkan untuk memperpanjang *Partnership and Cooperation Agreement* antara kedua satuan ini, veto Polandia atas pembaruan PCA dengan Rusia, yang dibergantungkan negara itu kepada penghapusan pelarangan impor daging Polandia ke Rusia di

tahun 2005. Pembaruan PCA juga menawarkan prospek, sasaran dan prinsip-prinsip dasar kerjasama energi dengan Rusia, karena Moskou terus menolak untuk meratifikasi *Energy Charter Treaty* yang membuka pasar energi Rusia bagi investor-investor asing.

Pada 13 Desember 2006 Parlemen Eropa mengeluarkan pernyataan atas KTT UE-Rusia di Helsinki itu yang intinya Parlemen mengakui pentingnya Rusia sebagai mitra kerjasama strategis, tidak saja di bidang ekonomi, perdagangan melainkan juga di bidang kerjasama internasional. Ia mendorong Presidensi Finlandia dan Jerman untuk mengusahakan suatu perjanjian yang baru antara keduanya sesegera mungkin. Parlemen Eropa menekankan:

"a robust defence of human rights and democratic values should be a core principle of any EU engagement with Russia."

Parlemen Eropa juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Rusia sebagai:

"a necessary strategic partner to ensure peace, stability and security and fight international terrorism and violent extremism, as well as address other security issues such as environmental and nuclear hazards, drugs, trafficking in arms and human beings and cross-border organized crime in the European neighbourhood."

Parlemen Eropa juga menghargai dialog UE-Rusia di bidang energi :

*“underlined the strategic importance of cooperation on energy, and stressed that further cooperation in this field must be based on principles of interdependence and transparency, as well as the importance of reciprocity in terms of access to markets, infrastructure and investment.”*²

Tetapi kerjasama Uni Eropa-Rusia dinilai UE akan mengalami banyak hambatan. Rusia mempunyai suatu birokrasi yang sangat berkuasa, suatu sistem hukum yang sangat dipengaruhi politik, badan-badan penegakan hukum yang sangat represif dan suatu masyarakat warga (*civil society*) yang lemah. Kekuasaan makin lama makin terpusat di tangan Presiden.³

Perluasan Uni Eropa ke Timur

Secara historis, khususnya di tahun 1930-an, kebijakan *Drang nach Osten* Jerman merupakan usaha vital negara itu untuk mengamankan wilayahnya dari setiap ancaman dari sebelah Timur. *Drang* ini, atau

Ostpolitik sebagaimana kemudian dirumuskan semasa Willy Brandt menjadi perdana menteri Jerman Barat, didesakkan atas Uni Eropa. *Ostpolitik* - perubahan melalui *rapprochement* (pendekatan) dengan negara-negara Eropa Timur - dicetuskan dan dikembangkan pemerintah Willy Brandt untuk menormalisasi hubungan Jerman Barat dengan Jerman Timur dan negara-negara Eropa Timur. *Ostpolitik* mengandung suatu komponen moral yang kuat, yang didasarkan pada pertanggungjawaban Jerman atas terjadinya pembagian Jerman dan Perang Dingin. Perluasan ke Timur Uni Eropa itu merupakan upaya untuk menstabilkan wilayah-wilayah sebelah Timur Jerman yang mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan yang sangat “mencekam” bagi keamanan Jerman dan Uni Eropa. Sejak permulaan dasawarsa 1990-an imperatif mendasar keamanan ini merupakan pendorong kuat sekali bagi Jerman untuk mengintegrasikan negara-negara tetangga sebelah Timurnya.⁴

² *Europa* - Bulletin for the European Union - 12-2006, Rusia, 1.33.14 European Parliament resolution on the European Union Russia Summit in Helsinki on 24 November 2006, <http://europa.eu/cgi-bin/printbu.cgi?Ing=en&no=200612&pt=p133014>, diakses 15 Maret 2007

³ Country Strategy Paper 2007-2013, Russian Federation, h. 3

⁴ Lihat antara lain Charlie Jeffry dan William E. Petersen, “Deutschland, Frankreich - und Grossbritannien? Eine britische Sicht deutscher Europa-Politik”, <http://www.internationale-politik.de/archiv/jahrgang1999/november>, diakses 26 November 2006

Tanpa perluasan itu, Jerman akan tetap merupakan suatu *frontline state*, yang senantiasa terbuka bagi ketidakpastian dan konflik di Eropa bagian Timur. Perluasan NATO dianggap tidak dapat memberikan jaminan keamanan bagi Jerman dan Uni Eropa dari Timur. Ia hanya memberikan negara-negara Eropa Timur "a tranquilizer, not a cure". Keputusan Presiden Bill Clinton untuk memperluas NATO dengan memasukkan Polandia, Ceko, dan Hongaria sudah dianggap Boris Yeltsin sebagai suatu pengkhianatan. *Founding Act* yang membentuk suatu *Permanent Joint Council* antara Rusia dan NATO untuk menurunkan derajat kemarahan Rusia atas keanggotaan formal ketiga negara itu pada tahun 1997 tidak banyak berarti bagi pelembagaan kerjasama keamanan Rusia dengan dunia Barat. Putaran kedua ekspansi NATO (2004) yang memasukkan 7 negara, termasuk tiga Republik Baltik (Latvia, Lituania, Estonia), merupakan pukulan yang lebih berat lagi. Perluasan NATO ke Timur merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi peninjauan kembali pandangan geopolitik Rusia.

Pencakupan negara-negara Eropa Tengah dan Timur ke dalam Uni Eropa itulah lebih merupakan suatu pengobatan yang menyembuhkan Eropa Timur dari penyakit ketidakamanan dan bukan sekedar

"obat penenang". Max Jacobson dalam *International Herald Tribune* menulis sebagai berikut:

*"Only a gradual extension of the concept of economic, social and political integration so successfully applied in Western Europe can promote stability and prosperity in the eastern half of Europe and thereby create a reliable and lasting basis for the security of both halves."*⁵

Selama tahun 1990-an Rusia memang cenderung menerima perluasan Uni Eropa sebagai pengimbang NATO. Tetapi, kritik-kritik Eropa atas catatan-catatan yang kurang baik Rusia atas hak azasi manusia, demokrasi, seperti terdapat dalam *Country Strategy Papers* (2001-2006 dan 2007-2013), persengketaan tentang visa dan masalah perbatasan dan ketergantungan yang meningkat Uni Eropa atas minyak dan gas bumi Rusia mengubah pandangan Rusia tentang maksud baik Uni Eropa.

⁵ Max Jacobson, "Join Germany's Effort to Widen Europe", *International Herald Tribune*, May 24, 1994, <http://www.iht.com/articles/1994/05/24/edmax.php>



Sumber: *The Economist*, Jul 13th 2006

Politik Luar Negeri Rusia

Perluasan Uni Eropa ke Timur dan khususnya *Common Strategy of the European Union on Russia* yang menggariskan pengembangan demokrasi, *rule of law* dan pengintegrasian Rusia ke dalam wilayah ekonomi dan sosial Eropa menginstigasi Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengubah orientasi politik yang kompromistis terhadap Uni Eropa. Bukan demokrasi, *rule of law*, dan pengintegrasian ekonomi Rusia ke dalam UE yang merupakan tujuan pembangunan Rusia, melainkan pengembangan sumber daya energi dan penentuan pemanfaatan ekonomi dan politik yang menjadi inti kemitraan strategis Rusia dan Uni Eropa. Dalam masa kepresidenannya yang kedua Vladimir Putin “memulihkan kekuasaan negara dalam

kerangka ekonomi pasar”. Putin menegaskan bahwa demokrasi harus disesuaikan dengan berbagai situasi nasional, artinya bahwa demokrasi harus menyesuaikan diri dengan pemberian prioritas kepada tata tertib dan wibawa negara atas setiap manifestasi disintegrasi dan kekacauan. Ia meminta legitimasi atas pemusatan kekuasaan politiknya, yang sekaligus berarti penolakan terhadap demokrasi universal. Klaim atas legitimasi demokrasi yang otoriter merupakan kebijakan politik luar negeri Rusia terhadap Uni Eropa dan Amerika Serikat.⁶

⁶ Silvio Pons, “Putin’s Russia. Love and hatred towards the EU”, *Social Europe*, December 2005, <http://www.gramsci.it/pdf/SocialEurope-3pons.pdf>

Dengan reorientasi politik Rusia terhadap Uni Eropa, politik luar negeri Rusia mengalami perubahan yang mencolok. Multipolarisme yang dikembangkannya atas dasar perbedaan politik dan budaya dan *power politics* tidak *compatible* dengan jiwa multilateralisme yang mendasari peran internasional UE.

*"The relative activism of Russian policy towards China and India ... must be seen in this light, which is to say as the search for converging thrusts rather than strategic alliances."*⁷

Perkembangan politik internasional sesudah pemboman WTC pada 11 September 2001 memberi warna yang jelas dan tegas kepada kebijakan luar negeri Putin. Di satu pihak, kecenderungan militerisasi "perang melawan terorisme" di Irak merupakan dorongan yang besar bagi hasrat Putin untuk menginternasionalisasi perang di Chechnya dan dengan demikian melegitimasi penggunaan kekuatan militernya. Di lain pihak, gelombang demokrasi di negara-negara eks Uni Soviet terjadi justru pada saat pembatasan atas reformasi politiknya terjadi, juga sebagai akibat dari terorisme Chechnya.

Apa yang terjadi ialah lahirnya suatu kekuatan yang besar, yang mengakhiri kelemahan lembaga kepresidenan sejak pembentukannya

dan yang mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempertahankan Federasi Rusia, serta "sterilisasi" pluralisme politik dan demokrasi parlementer yang mulai bersemi di Rusia setelah bubarnya Uni Soviet.

Jadi, konsolidasi kekuasaan Kepresiden Rusia di bawah Putin tidak saja merupakan penegasan kekuasaan pribadi, melainkan sekaligus pembangunan kembali otoritas negara setelah disintegrasi yang dialami Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Dengan demikian, Putin mengakhiri fase dalam sejarah Rusia yang diciptakan Gorbachov dan yang dilanjutkan oleh Boris Yeltsin. Otoriterisme pasar dan keberlanjutan kekuasaan negara disajikan sebagai ramuan integrasi internasional Rusia. Dengan pembangunan citra Rusia ini Putin mengakhiri fase kepemimpinan Yeltsin yang bercirikan kerjasama dan persaingan dengan Uni Eropa. Kini, ide integrasi Rusia dan Uni Eropa yang didorong Putin tidak akan melangkah lebih jauh dari kerjasama yang selektif dan kondisional. Perkembangan di Rusia di bawah Vladimir Putin memperlihatkan bahwa ada hubungan yang sulit antara keamanan dan ekspansi demokrasi yang universal.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat juga Silvio Pons, "Putin's Russia. Love and Hatred towards the EU", *Social Europe*, Desember 2005, <http://www.gramsci.it/pdf/SocialEurope-3pons.pdf>

Atas dasar perkembangan ini Vladimir Putin menuntut agar demokrasi yang didesakkan Uni Eropa dan Amerika Serikat atas Rusia harus disesuaikan dengan jiwa nasional negara itu yang ditumbuhkan kembali. Ia menunjuk ke jiwa Rusia yang lebih mementingkan *orde* dan prestise negara atas disintegrasi dan kekacauan. Dengan demikian, Putin menegaskan dan mengesahkan "pemusatan" kekuasaannya yang sekaligus merupakan penolakan yang tegas atas setiap usaha Uni Eropa dan Amerika Serikat yang memaksakan demokrasi yang "universal" atas Rusia.

Demokrasi otoriter yang dikembangkan Putin merupakan kebijakan untuk menentang keberlanjutan pelaksanaan *Common Strategy of the European Union on Russia*. Bukan lagi konsolidasi demokrasi, *rule of law* dan lembaga-lembaga publik Rusia dan pengintegrasian Rusia ke dalam wilayah ekonomi dan sosial Eropa, melainkan energi yang kini merupakan inti kemitraan strategis Rusia dengan Uni Eropa dan dengan demikian membalikkan Strategi Bersama Uni Eropa-Rusia versi UE. Minyak juga merupakan penyebab ketegangan dengan Amerika Serikat tentang jalur pipa minyak dari Laut Kaspia dan Asia Tengah. Fyodor Lukyanov, editor Rusia dalam *Global Affairs* menulis:

"The Partnership and Co-operation Agreement that Russia first signed with the EU a decade ago had 'an integrationist goal'. It meant that Russia should gradually adopt EU standards. But under Putin, Russia doesn't want to become just like Europe. It won't have human rights as a priority. It doesn't want to be endlessly coming to agreements on things."

Pengembangan kekuasaan kepresidenan Rusia tercermin dengan kuat dalam politik luar negeri Rusia: Pertama, kepemimpinan tegas Presiden Putin; kedua, penanganan tegas ekonomi Rusia oleh Putin sehingga negara itu kini telah berhasil membangun ekonominya kembali (dengan menghimpun US\$100 milyar dalam valuta asing), dan ketiga, produksi minyak dan gas bumi Rusia yang terus meningkat disertai penghasilan yang besar karena kenaikan harga minyak dan gas bumi secara global. Minyak dan gas ini makin banyak dipakai Rusia sebagai alat diplomasi dan politik dalam hubungannya dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Heavily dependent on Russia for fuel and with demand rising, European governments have been struggling to find a way to deal with Mr Putin who has not been afraid to use his country's status as the world's largest fuel exporter as an economic

weapon.⁹

Sebagai akibat dari ketiga faktor ini Rusia melengkapi kebijakannya ke Uni Eropa dengan mengarahkan kebijakan luar negerinya ke Asia Timur. Rusia lalu memberikan lebih banyak perhatian ke Asia Timur dalam rangka inisiatif politik luar negerinya. Ini tidak berarti bahwa Rusia tidak mementingkan Uni Eropa, melainkan "prioritas" politik luar negerinya lebih banyak diberikan ke Asia Timur. Ada beberapa perkembangan yang menunjuk ke arah itu yakni pengembangan kemitraan strategis Rusia-China sehingga persengketaan perbatasan antara kedua negara dapat diselesaikan; latihan militer bersama Rusia-China, yang dihadiri oleh banyak negara kecuali Amerika Serikat yang tidak diundang; pengembangan Organisasi Kerjasama Shanghai menuju semacam persekutuan militer, tanpa keikutsertaan AS. Rusia bahkan menuntut agar AS menarik kekuatan militernya dari negara-negara Asia Tengah.

Sebelumnya Rusia tidak keberatan ketika Amerika Serikat membangun kehadiran militer di beberapa Republik Asia Tengah dalam perangnya melawan Taliban dan Al Qaeda di Afganistan. Rusia berharap bahwa

dengan persetujuannya itu Amerika Serikat dan Uni Eropa mendukung langkah-langkah Rusia dalam menumpas Jihad Islamiah di Chechnya. Tapi Rusia kemudian menyadari bahwa AS selektif dalam pendekatannya terhadap terorisme global. Perlawanan Chechnya terhadap Rusia bukan dilihat AS sebagai suatu perang terhadap terorisme. Pembangkitan kembali kekuatan Rusia dapat mengembalikan *strategic preeminence*-nya di negara-negara Asia Tengah itu. Uzbekistan sudah dapat membuat Amerika Serikat menarik pangkalan angkatan udaranya dari negara itu. Rusia bersama dengan China dalam Organisasi Kerjasama Shanghai sudah meminta AS untuk menjadwalkan penarikan mundur pangkalan-pangkalan militernya dari negara-negara Asia Tengah yang lain. Rusia juga merancang suatu format baru bagi *Commonwealth of Independent States* (CIS) yang dibentuk sesudah runtuhnya Uni Soviet. Tujuannya ialah membangun suatu jejaring hubungan keamanan bilateral yang baru.¹⁰

Melalui berbagai inisiatif politik luar negeri ini Rusia memberi isyarat kepada Amerika Serikat dan Uni

⁹ Stephen Castle, Putin defies EU with threat to Georgia - *Independent Online Edition*, 19 April 2007, <http://news.independent.co.uk/europe/article1916346.ece>

¹⁰ Subhash Kapila, "Russia's Foreign policy in a Resurgent Mode: An Analysis", *South Asia Analysis Group (SAAG)*, Paper no. 1682, 19.01.2006, <http://www.saag.org/%5Cpapers17%5Cpaper1682.html>

Eropa bahwa negara itu bersama-sama dengan China bertekad untuk mengubah perimbangan kekuatan di wilayah Asia Timur. Usaha Rusia untuk mendapatkan tempat berpijak di Asia Tenggara diperolehnya dengan menjadi anggota ASEAN *Regional Forum* dan kemudian menjadi terlibat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* di bulan November 2004. Rusia diundang untuk menghadiri *East Asia Summit* di Kuala Lumpur pada 2005, kendatipun Australia dan Selandia Baru menentangnya, juga karena Amerika Serikat tidak diundang untuk menghadiri pertemuan puncak itu. Presiden Vladimir Putin sendirilah yang menghadiri *East Asia Summit* di Kuala Lumpur itu. ASEAN lalu mengadakan pertemuan ASEAN-Rusia, karena mereka sadar bahwa Rusia harus dimasukkan ke dalam perhitungan strategis ASEAN di kawasan Asia Pasifik.

Kemitraan strategis Rusia-India menurun dengan drastis semasa kepresidenan Gorbachov dan Yeltsin, karena kebijakan-kebijakan kedua pemimpin Rusia terbebani pengaruh besar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemitraan ini menguat kembali setelah dua pertemuan puncak di New Delhi dan Moskow dan kunjungan menteri pertahanan India ke Moskow di bulan Oktober 2005 menghidupkan kembali kemitraan strategis antara

kedua negara itu. Di tahun 2005 itu pula India menyatakan secara resmi bahwa Rusia akan tetap merupakan mitra strategis India yang utama dan pemasok utama sistem persenjataan. Presiden Putin juga secara resmi menyatakan bahwa Rusia mendukung pencalonan India bagi keanggotaan tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi India sangatlah penting untuk juga menghidupkan kembali kemitraan strategis India-Rusia.¹¹

Rusia juga mempunyai peran besar dalam perhitungan strategis di Timur Tengah. Di bawah Presiden Putin, Rusia berupaya mencapai tiga sasaran di wilayah ini. Pertama, Rusia hendak memperlihatkan kekuatan dan pengaruhnya yang baru di suatu wilayah di mana, menurut perkiraan mereka, pengaruh Amerika Serikat sedang menurun. Kedua, meningkatkan perdagangan dengan negara-negara di wilayah ini untuk mendukung ekonomi Rusia, khususnya di sektor-sektor non-energi. Sasaran ketiga ialah memperkecil dukungan Arab, Turki, dan Iran bagi pemberontakan Chechnya terhadap Rusia, yang dilakukannya atas nama Islam.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Robert O. Freedman, *How serious a challenge?*, bitterlemons-international.org, Middle-East Roundtable, March 22, 2007 Edition 12, Volume 5, <http://www.bitterlemons-international.org/inside.php?id=706>, diakses 1 April 2007

Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat perlu melibatkan Rusia dalam mengendalikan program nuklir Iran, yang mencerminkan peran Rusia sebagai pemain utama dalam strategi Timur Tengah: Rusia mempunyai kemitraan strategis dengan Iran dan dengan demikian juga tempat berpijak yang penting di Teluk Parsi. Rusia juga mempunyai hubungan baik dengan Siria dan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di wilayah ini. Kemitraan strategis Rusia-Iran-Siria adalah hubungan strategis yang mencakup Mediterania Timur sampai ke Teluk Parsi dan Afganistan.

Kebangkitan politik dan strategis Rusia ini, khususnya di Asia Timur, menjadi perhatian khusus Amerika Serikat, yang mendominasi wilayah Asia Pasifik sejak keruntuhan Uni Soviet. Dominasi dan hegemoni ini kini ditantang oleh Rusia dan juga China di daratan Asia Tengah dan Timur. Dan kemitraan strategis Rusia-China akan membuat tantangan ini makin besar. AS juga menghadapi pertumbuhan pengaruh politik dan kemiliteran Rusia di Timur Tengah, khususnya di sekitar Teluk Parsi, karena perkembangan hubungan strategis yang baru di wilayah itu dapat mengganggu arsitektur strategi dan keamanan di Timur Tengah.

Dengan tantangan Presiden Vladimir Putin atas *Common Strategy of the European Union on Russia* dalam

rangka *Partnership and Cooperation Agreement* antara UE dan Rusia, maka kemitraan dan kerjasama antara kedua pihak ini yang dikembangkan sejak kepresidenan Gorbachov dan Yeltsin mengalami penurunan derajat di bawah kepemimpinan Vladimir Putin.

*The EU approach to Russia is a post-modern one of 'cooperative security', whereas Russia pursues a modern, neo-realist approach to international relations adversely affecting its EU partnership. Interaction in the economic field and elsewhere has grown enormously, but tensions have risen climaxing in Russia's 'gas war' with Ukraine of early 2006 with its severe repercussions on EU-Russia relations. A closer examination of patterns of sensitivity and vulnerability reveals a complex distribution of options, assets and liabilities which both parties must address if relations are to prosper.*¹³ □

¹³ Mette Skak, "The EU-Russia Partnership Today", <http://person.au.dk/da/msk@ps.au.dk/pub>